



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMRINTAH
BIRO ADMINISTASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019**



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. LkjIP merupakan bentuk komitmen nyata Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 menyajikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dengan menjabarkan program tersebut dalam kegiatan-kegiatan. Penilaian capaian program dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator. Dengan dukungan sumber daya, sarana prasarana dan keuangan yang ada, serta kebersamaan pimpinan dan staf yang harmonis, tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja ini secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sekaligus sebagai sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kami menyadari masih ada kekurangan. Untuk itu segala sesuatu yang telah berjalan dengan baik akan dijaga dan ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang ada menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Demikian LkjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Semarang, Februari 2020

KEPALA BIRO ADM BANGDA

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196610161992032006

BAB I

PENDAHULUAN

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Administrasi Pembangunan Daerah berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari "Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi". Maka, melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan tujuan "Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah" sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya dirumuskan pula tiga sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah; Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka pada laporan ini akan disajikan uraian hasil kinerja tujuan dengan dua indikator dan tiga sasaran dengan 6 indikator.

Penyajian pelaporan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (Performance Gap). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk

peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (Performance Improvement). Laporan kinerja ini juga disampaikan kepada masyarakat dengan harapan hasil kinerja tujuan dan sasaran dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan lebih lanjut oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan Biro Adm Bangda Setda Provinsi Jateng

>> Biro Administrasi Pembangunan Daerah berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



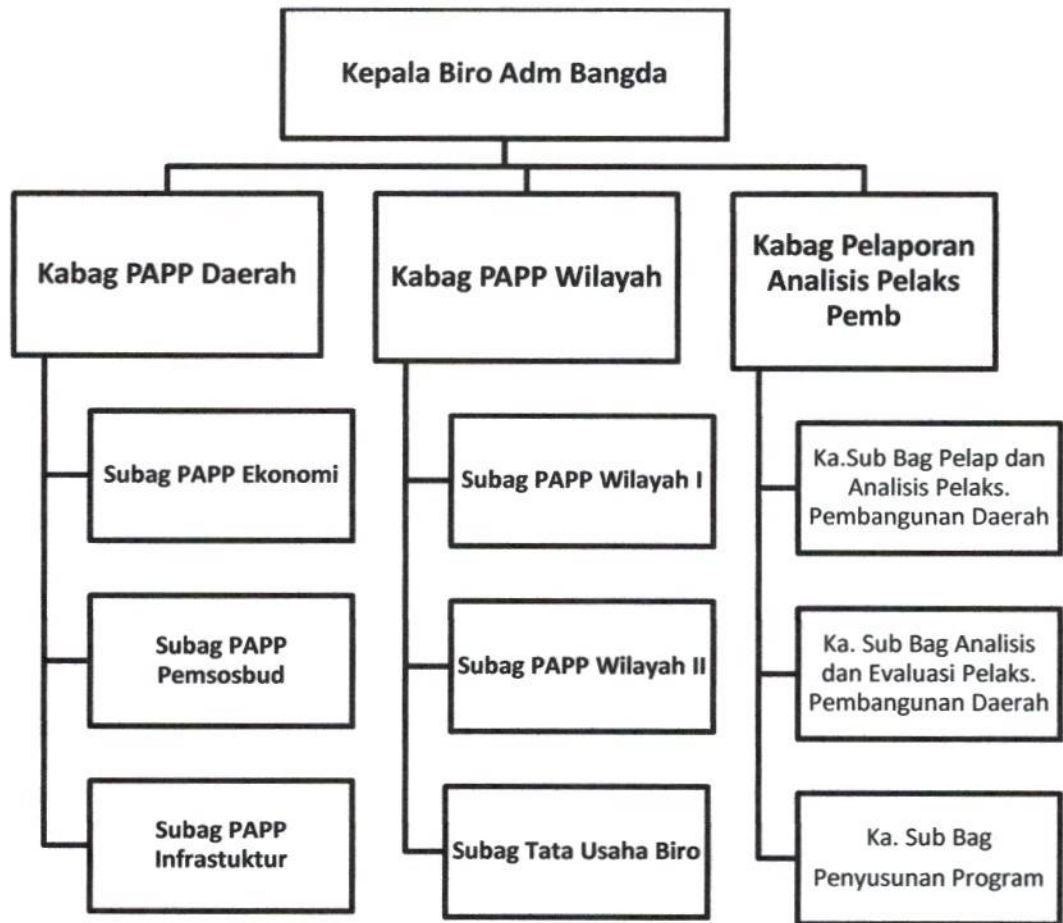
Tugas Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif antara lain: menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan pada tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyesuaian atas pelaksanaan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi
 - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - c. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;
2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, memb:
 - a. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
3. Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program

Berikut merupakan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Adm Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah

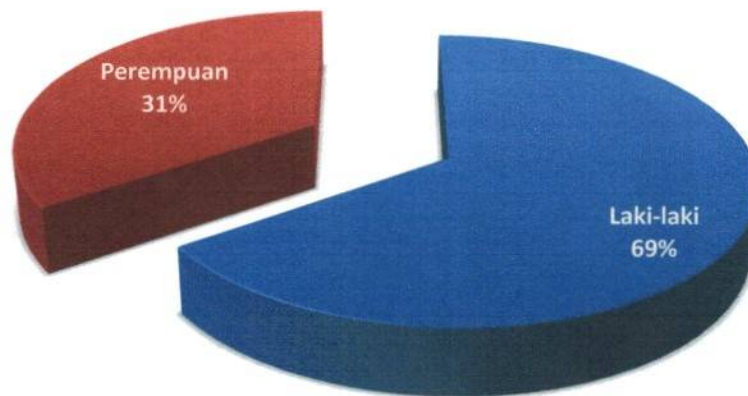
2. Susunan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan kinerjanya didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup memadai dari sisi kualitas dan kuantitas.

1 Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Biro Adm Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan kepangkatan dan jabatan per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Jumlah Laki laki	: 25 orang
Jumlah Perempuan	: 11 orang



Grafik 1.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 13 orang meliputi :

- 1) Eselon II.b : 1 Orang
- 2) Eselon III.a : 3 Orang
- 3) Eselon IV.a : 9 Orang

Jumlah staf sebanyak 23 orang.

Berdasarkan pangkat/golongan serta tingkat pendidikan, personil Biro Adm. Bangda adalah sebagai berikut :

a) Pangkat / Golongan Ruang

- Pembina Utama Muda : 1 orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : 2 Orang
- Pembina (IV/a) : 5 Orang
- Penata Tk. I (III/d) : 9 Orang
- Penata (III/c) : 7 Orang
- Penata Md Tk. I (III/b) : 10 Orang
- Penata Muda (III/a) : 1 Orang
- Pengatur (II/c) : 1 Orang
- Pengatur Muda (II/a) : 1 Orang

----- +
Jumlah : 36 Orang

b) Pendidikan

- Sarjana Strata 2 : 18 Orang
- Sarjana Strata 1 : 12 Orang
- Sarjana Muda : 1 Orang
- SMU/ sederajat : 4 Orang
- SD : 1 Orang

----- +
Jumlah : 36 Orang

2 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Adm Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang.

Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki :

- (tiga) ruang rapat yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal.
- Mesin Komputer sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah.
- Printer sebanyak 20 buah
- Laptop sebanyak 5 buah
- 1 (satu) mesin telepon/fax
- 3 (tiga) buah LCD,
- 4 (empat) TV.

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI BIRO ADM BANGDA

Permasalahan strategis Biro Adm Bangda Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

- Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan, OPD belum sepenuhnya mengacu pada RKO yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Bantuan Keuangan TA 2019 kepada kabupaten/kota kurang optimal.
- Dalam hal penyusunan LKPJ Gubernur Jateng, terkendala penyusunan mengacu pada regulasi baru (Peraturan Pemerintah no 13 tahun 2019) tetapi belum diatur dalam Permendagri.

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi penjabaran tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dengan target kinerja yang spesifik dan terukur sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat penjelasan kinerja program dan kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

Upaya perwujudan visi-misi pemerintahan daerah menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan Setda Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan fungsi Setda tersebut merupakan instrumen pengendali atas upaya pencapaian visi-misi pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

1. Visi-Misi

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam mewujudkan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Visi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari **"Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah mendukung pencapaian visi-misi dari Kepala Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah mendukung perwujudan melaksanakan reformasi birokrasi yang mampu merespon, memfasilitasi, dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat Daerah mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

2. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, melalui Renstra 2018-2023 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan tujuan sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah, yaitu:

"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah"

Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan tiga Sasaran untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional dengan rumusan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut termuat dalam Bab IV Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 berikut:

Tabel 2.1.
Rencana Strategis Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target 2019
Tujuan Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	80
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80
Sasaran I Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85
Sasaran II Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85
Sasaran III Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolanan dan Kehumasan	75

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Biro Adm. Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018-2023, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Biro Adm. Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan :		
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik. • Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
Sasaran :		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan di bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis Formulasi Pengukuran : Jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1) Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak OPD yang capaian realisasi pelaksanaan APBD sesuai dengan target RKO. Indikator ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat tercapainya kesesuaian antara target dan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jateng. • Formulasi Pengukuran : Jumlah Indikator kinerja kegiatan APBD yang tercapai dibagi jumlah seluruh Indikator kegiatan APBD dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
	2) Persentase tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penyelesaian kegiatan pada kab/kota yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuangan. Indikator ini penting untuk memantau perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada kab/kota. • Formulasi Pengukuran : Jumlah persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota dibagi jumlah Kabupaten/Kota dikali 100%. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	3) Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketepatan OPD dalam melaporkan pelaksanaan APBD dan ketepatan kab/kota dalam melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD dan Kabupaten/Kota yang melakukan pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan sesuai kaedah dibagi Jumlah OPD dan Kabupaten/Kota dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
	4) Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : • Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset OPD dalam pelaksanaan APBD • Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang tercapai sesuai target dibagi seluruh Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come* dan berkesinambungan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja tahun 2019.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan **5** program, **15** kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah **Rp 12.799.410.000** (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan.

Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, sebagaimana pada tabel berikut:

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
Tujuan Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	80
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80
Sasaran I Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85
Sasaran II Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85
Sasaran III Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019 merumuskan 6 (enam) target kinerja pada level sasaran. 6 indikator target kinerja tersebut dikelompokkan dalam tiga rumusan kinerja sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) rentang capaian dan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang	Kategori
1.	>100%	Sangat Baik
2.	>75% sd. 100%	Baik
3.	55% sd. 75%	Cukup
4.	<55%	Kurang

Berikut uraian capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Kebijakan yang Efektif dan Sasaran Meningkatkan Sinergitas Kebijakan Daerah

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019		% Tingkat Capaian 2019	Target Akhir Renstra	% Tingkat Capaian terhadap Renstra
	Target	Realisasi			
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah					
Persentase Kebijakan yang Efektif	80	93,02	116,28	84	110,74
Sasaran I: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah					
Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	100	117,65	85	117,65
Rata-Rata Capaian Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah			117,65		117,65

Capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** melalui 1 indikator dengan rata-rata tingkat capaian 117,65% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tercapainya **Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** secara linear sinergis dengan pencapaian indikator kinerja **Tujuan persentase kebijakan yang efektif** yang mampu direalisasikan sebesar **93,02%** dan dengan tingkat capaian **116,28%** terhadap target atau berada pada kategori **Sangat Baik**. Faktor utama yang mendukung pencapaian ini adalah pelaksanaan proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui perumusan tema kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pelaksana, proses analisis permasalahan dan alternatif kebijakan yang didukung data lapangan, dan koordinasi pengawalan pelaksanaan kebijakan oleh perangkat daerah pelaksana secara intensif.

Hambatan dan tantangan dalam mewujudkan sinergi dan efektifitas kebijakan daerah antara lain berupa adanya kompleksitas masalah yang berbeda-beda pada setiap kebijakan mengharuskan pendalaman permasalahan, penggalan data, pembelajaran Banchmarking, perumusan alternatif kebijakan dan rekomendasi yang

membutuhkan waktu dan kemampuan analisis kebijakan pada berbagai level sesuai dengan setiap kebutuhan pemecahan masalah pembangunan daerah.

Upaya yang dilakukan untuk menangani sejumlah hambatan dan tantangan antara lain dengan meningkatkan pemahaman terhadap masalah pembangunan melalui proses penggalian data dan informasi praktik-praktik terbaik serta menggalang kerjasama dengan sejumlah tenaga ahli yang kompeten di bidangnya dalam merumuskan berbagai alternatif penyelesaian masalah kebijakan pembangunan daerah secara praktis dan berkelanjutan.

Pencapaian kinerja **Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kebijakan yang efektif di Provinsi Jawa Tengah didukung dengan alokasi APBD sebesar Rp 111.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp 107.986.245 atau 96,68 %

Penggunaan anggaran yang mampu mewujudkan kinerja Sangat Baik pada target kinerja sasaran dan tujuan ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan belanja, yang dalam hal ini mencapai **3,32 %**.

Pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan kegiatan yaitu

- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan , Pendapatan dan Aset.

Lingkup kinerja sasaran kedua adalah **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang juga diorientasi untuk mewujudkan **Tujuan Organisasi dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**. Berikut gambaran capaian kinerja sasaran kedua Biro Adm Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019		%	Target Renstra	%
	Target	Realisasi			
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah					
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	86,36	107,95	84	102,81
Sasaran II: Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	81	101,25	85	95,29
Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	96,6	120,75	85	113,65
Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	95,63	119,54	84	113,85
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	85,71	100,84	85	100,84
Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			110,59		110,59

Capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** melalui 4 indikator dengan rata-rata tingkat capaian 110,59% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tercapainya **Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** secara linear sinergis dengan pencapaian kinerja **indikator Tujuan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** yang mampu direalisasikan sebesar **86,36%** dan dengan tingkat capaian **107,95%** terhadap target atau berada pada kategori **Sangat Baik**. Faktor utama yang mendukung pencapaian ini adalah adanya kebijakan pembinaan OPD pada lingkup Biro, koordinasi yang intensif Biro dengan OPD pelaksana, dan adanya instrumen

pengendalian kinerja (e-controlling kinerja) yang efektif dalam pengendalian kinerja pembangunan.

Hambatan dan tantangan dalam mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan khususnya dalam mengungkit capaian kinerja perangkat daerah antara lain masih adanya persepsi yang sama tentang fungsi Setda sebagai pengendali kinerja pembangunan, masih adanya indikator utama perangkat daerah yang tidak secara langsung tercermin dalam penganggaran dan aktivitas pelaksanaan kegiatan, dan adanya indikator yang capaiannya tergantung pada rilis data pihak lain.

Upaya yang dilakukan untuk menangani sejumlah hambatan dan tantangan antara lain dengan meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi sebagai koordinator pelaksanaan tugas perangkat daerah, mendorong agar OPD merumuskan rencana aksi dalam pencapaian kinerja utama perangkat daerah, melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai stakeholders terkait agar melakukan rilis data/informasi agar penilaian kinerja dapat dilakukan lebih baik, serta memanfaatkan sistem informasi capaian kinerja melalui e-controlling kinerja.

Pencapaian kinerja **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** didukung dengan alokasi APBD sebesar Rp 11.629.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.828.838.531,- atau 95,44%. Penggunaan anggaran yang mampu mewujudkan kinerja dengan Sangat Baik pada target kinerja sasaran dan tujuan ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan belanja, yang dalam hal ini mencapai **4,56%**.

Terdapat dua program prioritas yang secara khusus diorientasi untuk mewujudkan **Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dan capaian kinerja perangkat daerah, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Program

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jateng
3. Kegiatan Sinergitas TEPPRA Provinsi Jateng dan Kab/Kota
4. Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
5. Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan kab/kota
6. Kegiatan Analisis Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
7. Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng
8. Kegiatan Pemantauan dan Pemanfaatan Evaluasi DAK di Jateng
9. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Lingkup kinerja sasaran ketiga Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah** yang penilaiannya sekaligus sebagai penilaian indikator tujuan ketiga Setda, yaitu: **Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda**. juga diorientasi untuk mewujudkan **Tujuan Organisasi dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**. Berikut gambaran capaian kinerja sasaran ketiga Setda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019		%	Target Renstra	%
	Target	Realisasi			
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah					

Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	75,63	100,84	80	94,54%
Sasaran III: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah					
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75	75,63	100,84	80	94,54%

Tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di Biro Administrasi Pembangunan Daerah, disebabkan oleh arahan pimpinan untuk melaksanakan pelayanan prima, adanya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, terwujudnya tertib penatausahaan keuangan, dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Hambatan/tantangan dalam peningkatan pelayanan Setda adalah terbatasnya SDM yang mumpuni harus melayani lingkup pelayanan kerumahtanggaan dan umum yang beragam se Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengintensifkan koordinas internal tentang pelayanan umum, kepegawaian, kehumasan dan lain-lain.

Guna mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah dialokasikan APBD sebesar Rp Rp 1.058.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 992.938.992 atau 93,82% dengan penggunaan anggaran yang telah sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar **6,18%**.

Terdapat dua program prioritas yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan administasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan Biro Adm Bangda, yaitu: Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perangkat Daerah dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan pencapaian Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, maka Tujuan untuk Meningkatkan Efektifitas Manjamenen Pemerintah Daerah juga tercapai. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan kinerja program dan kegiatan pada lingkup **sasaran ketiga ini sangat baik.**

Pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perangkat Daerah dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi di dalam dan luar daerah
3. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019, perlu dilakukan analisis dan evaluasi Akuntabilitas Keuangan, yaitu :

a. Target Pendapatan

Sesuai dengan Tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan atau sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga pada LkjIP Tahun 2019 tidak dilakukan analisis yang berdasarkan Target Pendapatan.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2019

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.799.410.000,

Sampai dengan akhir Desember 2019 anggaran tersebut terserap sebanyak Rp 11.929.763.768 atau realisasi keuangannya sebesar 93,21 %. Seluruh anggaran di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan anggaran Belanja Langsung, karena anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi satu

dengan Anggaran Belanja Tidak Langsung Setda Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini

NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	S/D BULAN INI	
		(Rp)	(%)
3	5	9	10
NON URUSAN			
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah			
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	60.000.000	59.947.000	99,91
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	620.000.000	561.896.945	90,63
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	90.000.000	89.800.000	99,78
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah			
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	188.300.000	182.965.300	97,17
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	98.329.747	98,33
FUNGSI LAINNYA			
Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah			
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	111.700.000	107.986.245	96,68
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah			
Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	900.000.000	879.549.106	97,73
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah	760.000.000	752.963.674	99,07
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jawa Tengah	6.108.805.000	5.466.342.877	89,48
Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	950.000.000	941.048.120	99,06
Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota	167.500.000	142.535.140	85,1
Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	678.105.000	675.580.500	99,63
Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah	1.575.000.000	1.486.956.850	94,41

Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota	400.000.000	396.863.264	99,22
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan Daerah			
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran	90.000.000	86.999.000	96,67
	12.799.410.000	11.929.763.768	93,21

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

1. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah melalui 1 indikator dengan rata-rata tingkat capaian 117,65% atau masuk dalam kategori Sangat Baik. Tercapainya Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah secara linear sinergis dengan pencapaian indikator kinerja Tujuan persentase kebijakan yang efektif yang mampu direalisasikan sebesar 93,02% dan dengan tingkat capaian 116,28% terhadap target atau berada pada kategori Sangat Baik.
2. Capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** melalui 4 indikator dengan rata-rata tingkat capaian 110,59% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tercapainya **Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** secara linear sinergis dengan pencapaian kinerja **indikator Tujuan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** yang mampu direalisasikan sebesar **86,36%** dan dengan tingkat capaian **107,95%** terhadap target atau berada pada kategori **Sangat Baik**
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di lingkungan Biro Adm Bangda terealisasi 75,63% terhadap target 75% atau berada pada tingkat capaian 100,84% sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.

b. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya adalah frekuensi pekerjaan yang sangat padat, dalam hal pengendalian dan pelaporan kinerja SKPD seringkali

ditemui sinkronisasi data yang tidak sesuai dengan target dalam perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dan pekerjaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja maupun di luar hari kerja. Selain itu juga diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan SKPD dalam rangka pengendalian dan pelaporan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.